

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR DI KARANGASEM, BALI

I Made Tamba dan I Wayan Cipta

Jurusan Agribisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

National program on community self-reliance empowerment or PNPM has been introduced by central government as national policy to reduce poverty as well as to achieve MDGs goals. Nevertheless, assessment on effectiveness such a program is lacking. This research is aimed to assess PNPM program on coastal communities in Kubu district Karangasem regency, Bali. Using census and snow ball methods, the community participation was chosen as assessment indicator along with other socio-economic variables. The results show that PNPM-MKP is performing well judging from community participation with average response of medium level participation, while monitoring and evaluation show higher scores. Overall total score of participation is relatively high. Some factors which correlate with community participation are group of age, education level, number of family members, number of fishing tools owned, and income

Keywords: *coastal community, empowerment, PNPM-MKP model, community participation.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

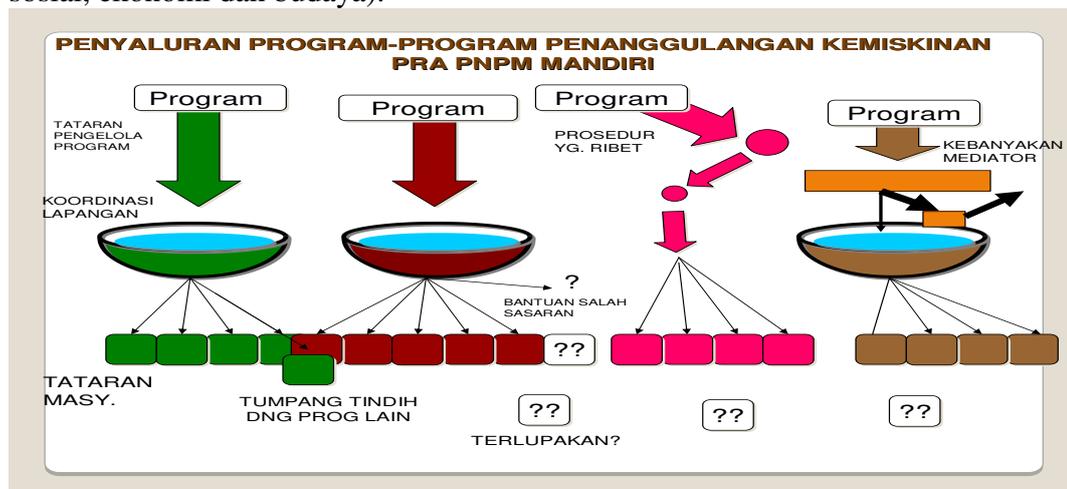
Program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak dilakukan, seperti: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program-program bergulir lainnya. Namun, sebagian besar program tersebut bersifat *top-down*. Disamping itu, ada beberapa program yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena penentuan sasaran secara langsung tanpa melalui proses perencanaan dan tidak melihat kondisi langsung di masyarakat. Beberapa program memiliki prosedur yang sangat rumit sehingga tidak tepat waktu, tidak efektif dan tidak efisien.

Usman (1998) menyatakan perlunya pendekatan khusus dalam upaya penguatan perekonomian masyarakat terutama kelompok nelayan kecil seperti: 1) pendekatan teknokratis yaitu pendekatan yang diawali dengan terlebih dahulu menetapkan program-program dan kelompok-kelompok sasaran (*target*), kemudian dilanjutkan dengan membakukan sistem penyaluran (*delivery system*) bagi kelompok-kelompok sasaran, mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta mengeluarkan anggaran pendukung pelaksanaan teknis, 2) pendekatan partisipatif yaitu dengan memperkuat kemandirian (*community self-reliance*). Masyarakat dibantu, didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis terhadap masalah keuangan yang dihadapi, diberikan peluang memutuskan yang dikehendaki dan inisiatif mereka menjadi basis kegiatan. Peran

pemerintah sebagai fasilitator dan memberikan dukungan inisiatif kepada masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program PNPM Mandiri adalah program untuk mencapai salah satu sasaran dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Kerangka pemikiran PNPM Mandiri adalah: 1) penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif bila dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan melalui sinergi dan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (LSM, swasta, dan lain-lain); 2) kemandirian yang berkelanjutan akan diwujudkan dalam tiga pilar yaitu masyarakat dengan tingkat keberdayaan dan kemandirian yang tinggi, pemerintah dan legislatif yang *pro poor*, dan dunia usaha dan organisasi masyarakat yang peduli (*the caring society*); 3) PNPM Mandiri bukan proyek ”bagi-bagi uang”, namun harus dilandasi dengan pembinaan karakter masyarakat yang baik dan beradab seperti: mempunyai cita-cita dan impian (*the power of dream*), mempunyai perilaku memberi daripada meminta (*the power to give*), mempunyai kemantapan mental berpikir positif, selalu mengutamakan dialog dan menghindari kekerasan (*democracy at the grass root*), dan selalu berusaha dan bekerja bersama kelompok (kegotongroyongan sosial, ekonomi dan budaya).



Gambar 1. Program-Program Pengentasan Kemiskinan Sebelum Pola PNPM Mandiri (Sumber: Royat, 2009)

Kabupaten Karangasem merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal atau kabupaten miskin. Salah satu kecamatan yang mewilayahi pesisir dan tergolong miskin adalah kecamatan Kubu. Kecamatan Kubu yang memiliki luas wilayah 234,72 km², terbagi dalam 9 desa yaitu Ban, Dukuh, Kubu, Tulamben, Baturinggih, Sukadana, Tianyar Timur, Tianyar Tengah dan Tianyar Barat. Dari 9 desa tersebut, 7 desa diantaranya (kecuali Ban dan Dukuh) merupakan desa pantai dengan panjang pantai sekitar 24,4 km. Jumlah penduduk di kecamatan Kubu tercatat 67.559 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 33.731 jiwa dan perempuan 33.828 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut kecamatan Kubu memiliki jumlah Rumah Tangga Miskin

(RTM) sebesar 7.833 KK atau 27.762 jiwa. Jumlah RTM di kabupaten Karangasem kalau dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala rumah tangganya adalah SD/MI, dan kecamatan Kubu menempati peringkat paling tinggi yaitu sebesar 7.646 RTM (20,71%).

Disamping faktor internal yang menjadi penyebab kemiskinan pada masyarakat pesisir, faktor eksternal juga sangat berpengaruh. Selama lebih dari 3 dekade perhatian pemerintah relatif kurang terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat di bidang kelautan dan perikanan sering kali termajinalkan karena kurangnya keberpihakan kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan secara menyeluruh bagi masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan dan pemanfaatan potensi yang belum optimal pada nelayan meliputi aspek penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran, pengawasan serta sumber daya manusia. Hal ini akan menambah kondisi masyarakat kelautan dan perikanan yang cenderung miskin dan terbelakang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini ini adalah: 1) bagaimanakah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?; 2) bagaimanakah dukungan masyarakat pesisir terhadap model pemberdayaan masyarakat dengan Pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?; dan 3) faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM- MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pola PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, sehingga nantinya dapat dijadikan model perbaikan pelaksanaan program bagi pemerintah pusat dan perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan oleh Pemda Kabupaten Karangasem khususnya Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; 2) untuk mengetahui dukungan masyarakat pesisir terhadap model pemberdayaan masyarakat dengan Pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; dan 3) untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai bahan masukan bagi akademisi dan *stake holder* di dalam memperkaya teori-teori mengenai pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan manfaat praktisnya adalah untuk dipakai model/acuan untuk proses pemberdayaan oleh pemerintah, dan *stake holder* yang bergerak pada bidang pemberdayaan masyarakat pesisir di dalam menentukan arah dan kebijakannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Analisis Model

Analisis Model adalah identifikasi bagian-bagian dalam gambaran suatu sistem yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang diinginkan, membangun dasar untuk model baru, dan menetapkan persyaratan dari model yang akan dibangun.

Analisis Model membantu mengidentifikasi hal-hal perbaikan penting yang akan dilakukan, serta memberikan strategi positif untuk mengevaluasi diri untuk memahami struktur dan efektifitas dari suatu sistem. Lebih lanjut dijelaskan bahwa analisis model dapat dipakai sebagai alat untuk pembinaan peningkatan pembangunan.¹

2.2. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

2.2.1. Pengertian dan Karakteristik Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian tanah baik kering maupun yang terendam air laut, dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak, dan gelombang serta perembesan laut, sedangkan ke arah laut mencakup bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan pemukiman serta intensifikasi pertanian.²

Wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik, yaitu : 1) wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan darat, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas; 2) berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan dan mencari ikan; 3) wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut; 4) memiliki gradien perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan; dan 5) tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan, baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.³

2.2.2.. Permasalahan Masyarakat Pesisir

Saad (2006) mengatakan bahwa isu dan permasalahan pokok pengelolaan wilayah pesisir adalah kemiskinan masyarakat pesisir, konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut, penurunan kualitas sumber daya alam dan lingkungan, potensi sumberdaya pulau-pulau kecil belum dimanfaatkan secara optimal, pengelolaan konservasi laut belum optimal, kepastian hukum belum terjamin serta

¹ Alistair Cockburn. OO Analisis Model. (Online) <http://training.fws.gov/deo/pdfs/The%20Interpretive%20Development%20Model.pdf>. diakses 30 Mei 2010

² Dahuri, dkk. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta. Pradnya Paramita, 2001

³ Soedarma, D. Karakteristik Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pemanfaatannya. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Peranserta Lembaga Keagamaan/Adat oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Durjen KP3K DKP di Cipayung Bogor, 22-25 Agustus 2006

belum maksimalnya peranan lembaga kemasyarakatan di dalam pengelolaan dan pemanfaatan pesisir dan laut. Lebih lanjut dijelaskan penyebab kemiskinan masyarakat pesisir adalah lemahnya akses kepada lembaga keuangan resmi (terlilit utang dengan rentenir), belum adanya keberpihakan lembaga keuangan (persyaratan ketat dan tingkat kepercayaan rendah), lemahnya sistem dan manajemen usaha, dan lemahnya akses informasi iptek dan pasar.

2.2.3.. Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Definisi pemberdayaan (*empower*) menurut Merriam Webster and Oxford English Dictionary mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority* atau sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian kedua, *to give ability to or enable*, diartikan sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan.⁴

Kurniawan, (2006) mengatakan pemberdayaan adalah suatu proses perubahan dengan menempatkan kata kreatif dan prakarsa masyarakat yang sadar diri dan terbina sebagai titik tolak. Lebih lanjut dikatakan pemberdayaan mengandung dua unsur pokok yaitu kemandirian dan partisipasi. Kemandirian adalah proses kebangkitan kembali dan pengembangan kekuatan pada diri manusia yang mungkin sudah hilang karena ketergantungan, eksploitasi dan subordinasi yang mencakup kemandirian material, intelektual dan manajemen. Sedangkan partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara selektif. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi pasif, yaitu masyarakat dilibatkan dalam tindakan dalam kegiatan yang telah dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain, serta partisipasi aktif, yaitu proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri dengan cara merefleksikan atas tindakan mereka sebagai subjek yang sadar untuk mengambil keputusan untuk bertindak sendiri.

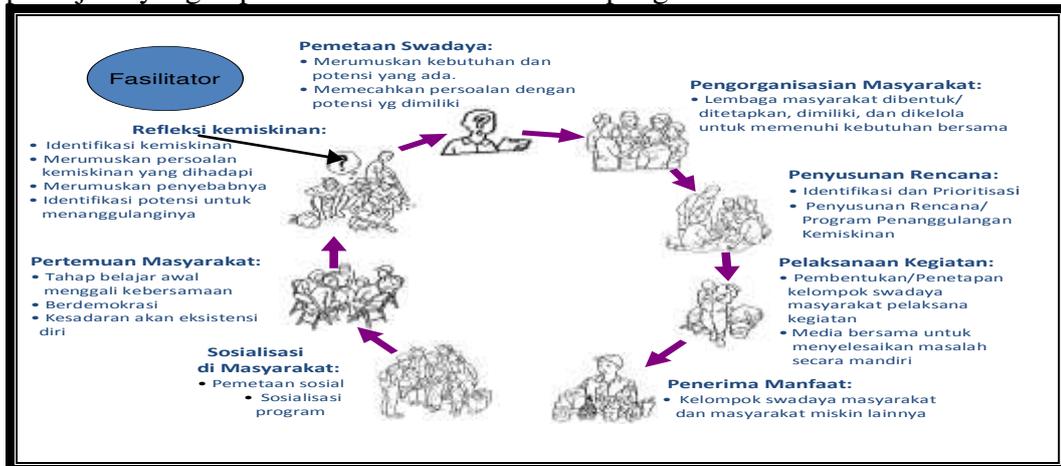
Upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang diharapkan mampu untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin tentunya perlu dikaji dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pelibatan aktif masyarakat sebagai penerima kebijakan dalam suatu kerangka *participatory rural appraisal (PRA)*. Penumbuhan partisipasi ini sangat penting mengingat masyarakatlah yang secara langsung melaksanakan dan merasakan hasil program yang digulirkan. Partisipasi ini dapat dikembangkan melalui berbagai institusi lokal yang kuat dan benar-benar mampu mewakili kepentingan masyarakat desa.⁵

Pembangunan di Indonesia semestinya dituntaskan dengan pemberdayaan masyarakat karena, 1) demokratisasi proses pembangunan (dengan melibatkan setiap warga negara dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi); 2) penguatan peran organisasi masyarakat lokal; 3) penguatan modal sosial; 4) penguatan kapasitas birokrasi lokal; dan 5)

⁴ Sunartiningih, A. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Jogjakarta. Aditya Media. 2004

⁵ Soetrisno, R. Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan. Yogyakarta. Philosophy Press. 2001

mempercepat penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan peluang pekerjaan yang dapat menambah/memberikan penghasilan.⁶



(Sumber : Tim Design PNPM Mandiri Bappenas, 2009)

Gambar 2. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah: 1) tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan; 2) tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal yang memungkinkan masyarakat dapat memperolehnya dengan harga murah dan kualitas baik; 3) meningkatnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah aksi kolektif; dan 4) terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif di daerah yang memiliki ciri-ciri berbasis sumberdaya lokal (*resources based*), memiliki pasar yang jelas (*market based*), dilakukan dengan cara berkelanjutan dengan memperhatikan kapasitas sumberdaya (*environmental based*), dimiliki dan dilaksanakan serta berdampak bagi masyarakat (*local social based*), dan dengan menggunakan teknologi maju tepat guna yang berasal dari proses pengkajian dan penelitian (*scientific based*).⁷

2.3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP)

Kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam PNPM-MKP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat kelautan dan perikanan miskin. Seluruh tahapan pelaksanaan PNPM-MKP berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan proses pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek pembangunan.⁸

Tujuan Program PNPM-MKP adalah untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan serta membangun infrastruktur pembentuk struktur ruang di wilayah desa dan pengurangan degradasi lingkungan.

⁶ Wrihatnolo, Randy R dan Dwidjowinoto, Riant Nugroho. Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2007. hlm. 37-41.

⁷ Pratikno, Widi Agus, op cit. hlm. 9

⁸ Departemen Kelautan dan Perikanan. Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2009. Jakarta. Dirjen KP3K. 2009

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada anggota kelompok nelayan penerima PNPM-MKP Tahun 2009 di 3 (tiga) desa yang kelompok nelayannya ditetapkan sebagai penerima PNPM-MKP yaitu : Desa Tianyar Timur, Baturinggih, dan Kubu di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem selama 2 (dua) bulan kalender yaitu pada bulan Mei sampai dengan Juni 2010.

Populasinya adalah anggota dari 10 kelompok nelayan penerima PNPM-MKP (99 orang) menggunakan metode sensus. Untuk mengetahui pelaksanaan PNPM-MKP dari pihak eksternal diambil informan dengan metode *snow ball*.

3.3. Instrumen Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah: 1) pelaksanaan PNPM-MKP; 2) tingkat dukungan masyarakat pesisir; dan 3) faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-MKP, sedangkan indikator tingkat dukungan masyarakat meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan money program.

Variabel pelaksanaan program PNPM-MKP akan diuraikan dengan deskriptif kualitatif. Sedangkan variabel-variabel tingkat dukungan masyarakat dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat akan diukur dengan kuisioner.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program, dan tingkat dukungan masyarakat berbentuk kuisioner dan pedoman wawancara, dengan menggunakan Skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban yang bergradasi (5 kategori) dan diberi skor 1-5 (satu sampai lima).

3.4. Jenis dan Bentuk Data

Data kualitatif mencakup deskripsi pelaksanaan PNPM-MKP, persepsi masyarakat terhadap PNPM-MKP, dukungan masyarakat pesisir terhadap PNPM-MKP, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sedangkan data kuantitatif berupa jumlah kelompok nelayan yang ada di Kecamatan Kubu, jumlah penduduk miskin/RTM di masing masing desa kelompok penerima PNPM, jumlah pendapatan per anggota kelompok, penilaian responden tentang pemberdayaan masyarakat pesisir dengan PNPM-MKP.

Data primer bersumber dari hasil observasi langsung peneliti ke kelompok penerima PNPM-MKP di Desa Kubu, Baturinggih dan Tianyar Timur, dan hasil sensus dari kelompok nelayan penerima PNPM-MK, sedangkan data sekunder bersumber dari Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem tentang jumlah kelompok nelayan di Kecamatan Kubu dengan jumlah anggotanya, jumlah dana PNPM-MKP yang disalurkan kepada kelompok penerima, jumlah dan jenis barang yang dibelanjakan dari BLM PNPM-MKP, serta data monografi dari masing-masing desa tempat kelompok penerima.

Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan metode observasi (pengamatan langsung ke lapangan), kuesioner (dengan daftar pertanyaan dan pedoman wawancara) dan dokumentasi (arsip data, foto-foto, dsb).

3.5. Analisis Data

Pelaksanaan program PNPM MKP dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sedang tingkat dukungan masyarakat dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan memberikan skor menggunakan Skala Likert (5 kategori) sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Skala Likert untuk evaluasi PNPM-MKP

No	Rentang Skor	Kategori dukungan masyarakat terhadap program PNPM-MKP
1	20% - 36%	Sangat Rendah
2	>36%- 52%	Rendah
3	>52% - 68%	Sedang
4	>68% - 84%	Tinggi
5	>84% - 100%	Sangat Tinggi

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM- MKP dianalisis dengan *Chi-Square*, dengan persyaratan jika $X^2 \text{ hitung} \leq X^2 (1-\alpha) (1)$, terima H_0 dan jika $X^2 \text{ hitung} > X^2 (1-\alpha) (1)$, tolak H_0

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dengan Pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Pelaksanaan program PNPM-MKP di Kecamatan Kubu pada tahun 2009 dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah: 1) Sosialisasi Program; 2) Penentuan Lokasi Sasaran; 3) Perencanaan Pembangunan Wilayah; 4) Peningkatan kapasitas dan sumber daya masyarakat; 5) Peningkatan kapasitas aparatur daerah; 6) Peningkatan akses kredit mikro; 7) Pendampingan masyarakat; 8) Publikasi kegiatan; 9) Proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok masyarakat; 10) Lokakarya PNPM-MKP; 11) Monitoring dan Evaluasi; 12) Realisasi Anggaran; dan 13) Pelaporan

Dari jawaban masyarakat penerima BLM dan pendapat pihak eksternal (konsultan dan tenaga pendamping) dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PNPM-MKP di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 adalah: 1) kemampuan pengelolaan program yang dilakukan oleh satuan kerja; 2) kondisi dan kemampuan kelompok penerima; 3) kondisi wilayah, sosial dan ekonomi dari desa tempat kelompok penerima; 4) tim teknis dan tim pendamping program; 5) proses pencairan dana dan penggunaan dana; dan 6) pelaksanaan, pemanfaatan dan monev program melibatkan kelompok penerima. Sedangkan faktor-faktor yang dianggap menghambat pelaksanaan program adalah: 1) lokasi sasaran yang menysasar hanya 1 kecamatan 3 desa; dan 2) menu dari barang-barang yang boleh diadakan sangat mengikat sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

4.2. Dukungan Masyarakat Pesisir Terhadap Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu

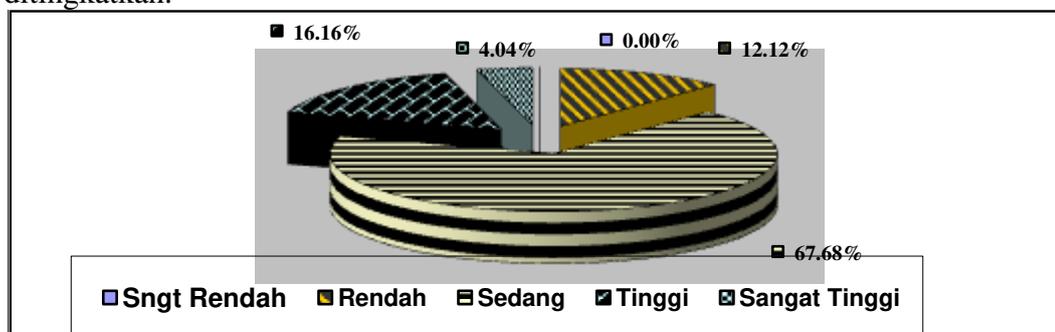
a. Karakteristik Responden

Dari hasil tabulasi data menunjukkan semua responden (100%) berjenis kelamin laki-laki, dengan karakteristik responden sebagai berikut :**1) Umur Responden**, menunjukkan bahwa 44,45% berumur 21-37 tahun, 42,42% berumur 38-54 tahun, dan 13,13% berumur 55-70 tahun (sasarannya adalah usia muda produktif); **2) Status Perkawinan** menunjukkan bahwa 15,15 % lajang (belum kawin), 80,81% kawin dan 4,04 % bersatus duda; **3) Tingkat Pendidikan** menunjukkan bahwa 5,05% buta huruf, 32,32% tidak tamat SD, 27,27% tamat SD, 19,19% tamat SMP, 13,13% tamat SMA, dan 3,03 % tamat Perguruan Tinggi. Dengan demikian hampir 64,64% sasaran PNPM-MKP di kecamatan Kubu hanya berpendidikan dasar, 32,32% berpendidikan menengah dan hanya 3,03% berpendidikan tinggi; **4) Pekerjaan Sampingan Responden**, menunjukkan 18,18% tidak memiliki pekerjaan sampingan; 51,52% petani; 6,06% peternak, 13,13% buruh (karyawan pariwisata, tukang bangunan dan sopir); 11,11% pekerjaan lainnya (PNS, pegawai asuransi, dan sebagainya); **5) Tanggungan Keluarga Responden**, menunjukkan bahwa 39,39 % memiliki tanggungan 0-2 orang, 54,55% memiliki tanggungan 3-4 orang, dan 6,06% memiliki tanggungan 5-6 orang; **6) Penguasaan Tanah**, menunjukkan bahwa untuk penguasaan tanah tegalan; 84,85% memiliki tanah 0-50 are, 12,12 % memiliki tanah 51-100 are, 0% memiliki tanah 101-150 are, dan 3,03% memiliki tanah 151-200 are. Untuk penguasaan tanah pekarangan; 65,66% memiliki 0-3 are, 31,31% memiliki 4-7 are, dan 3,03% memiliki 8-10 are. Sedangkan untuk status hak tanah tegalan: 50,51% tidak memiliki tanah tegalan, 43,43% merupakan hak milik, dan 6,06% merupakan sebagai penggarap (*nyakap*); **7) Sarana Usaha Nelayan**, menunjukkan bahwa untuk kepemilikan jukung : 2,02% tidak memiliki jukung, 90,91% memiliki jukung 1 unit, 5,05% memiliki jukung 2 unit dan 2,02% memiliki jukung sebanyak 3 unit. Untuk kepemilikan mesin (mesin motor tempel maupun mesin ketinting) menunjukkan bahwa 2,02% tidak memiliki, 84,85% memiliki mesin sebanyak 1 unit, 11,11% memiliki mesin sebanyak 2 unit dan 2,02% memiliki mesin sebanyak 3 unit. Sedangkan untuk kepemilikan sarana alat tangkap seperti jaring, pancing dan sebagainya: 72,73% memiliki 0-2 set, 17,17% memiliki 3-4 set, dan 10,10 % memiliki 5-6 set; **8) Pendapatan Nelayan**, menunjukkan bahwa pendapatan nelayan dari pekerjaan utama (sebagai nelayan) menunjukkan bahwa 12,12% pendapatannya 200.000 – 900.000 per bulan, 44,44% pendapatannya 901.000-1.600.000 per bulan, 28,28% pendapatannya 1.601.000-2.300.000 per bulan, 6,06% pendapatannya 2.301.000-3.000.000 per bulan. Sedangkan pendapatan dari pekerjaan sampingan menunjukkan 75,76% pendapatan sampingannya 0-500.000 per bulan, 19,19% pendapatan sampingannya 501.000-1.000.000 per bulan, 1,01% pendapatan sampingannya 1.001.000-1.500.000 per bulan, dan 4,04% pendapatan sampingannya 1.501.000–2.000.000 per bulan. Dengan demikian jumlah pendapatan nelayan secara keseluruhan menunjukkan bahwa 55,56% pendapatannya 800.000-1.850.000 per bulan, 35,35% pendapatannya 1.851.000 – 2.900.000 per bulan, 8,08% pendapatannya 2.901.000 – 3.950.000 per bulan, dan 1,01% pendapatannya 3.951.000-5.000.000 per bulan; **9) Pengeluaran Nelayan**, menunjukkan bahwa

pengeluaran nelayan untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) per bulannya, 13,13% pengeluarannya 200.000-450.000, 39,39% pendapatannya 451.000-700.000, 26,26% pengeluarannya 701.000-950.000, 21,21% pengeluarannya 951.000-1.200.000. Untuk pengeluaran non konsumsi (per bulannya) menunjukkan bahwa 95,96% pengeluarannya 100.000-825.000, 3,03% pengeluarannya 826.000-1.550.000, 0% pengeluarannya 1.551.000-2.275.000, dan 1,01% pengeluarannya 2.276.000-3.000.000, untuk pengeluaran operasional usaha nelayan (per bulannya) menunjukkan bahwa 52,53% pengeluarannya 100.000-450.000, 42,42% pengeluarannya 451.000-800.000, 2,02% pengeluarannya 801.000-1.150.000, dan 3,03% pengeluarannya 1.151.000-1.500.000. Dengan demikian kalau dilihat secara keseluruhannya, total pengeluaran nelayan (dalam rupiah per bulan) menunjukkan bahwa 50,55% total pengeluarannya 800.000-1.725.000, 43,43% pengeluarannya 1.726.000-2.650.000, 5,05% pengeluarannya 2.651.000-3.575.000, dan 1,01% pengeluarannya 3.576.000-4.500.000; **10) Kepemilikan Rumah Nelayan**, menunjukkan 74,75% milik sendiri, 24,24% milik orang tua, dan 1,01% dengan menyewa. Sedangkan jenis rumah yang dimiliki menunjukkan 32,32% rumah permanen, 68,68 % rumah semi permanen; **11) Kepemilikan Tabungan**, menunjukkan bahwa 77,78% tidak memiliki tabungan, sedangkan 32,32% memiliki tabungan; **12) Organisasi yang Diikuti dan Kedudukan Dalam Organisasi**, menunjukkan bahwa 62,63% ikut dalam 1-3 organisasi, 28,28% ikut dalam 4-5 organisasi, dan 9,09% ikut dalam 6-7 organisasi, sedangkan kedudukannya dalam organisasi menunjukkan 37,37% sebagai pengurus, 61,62 % sebagai anggota, dan 1,01% sebagai keanggotaan lainnya (penasehat); dan **13) Partisipasi Terhadap Kegiatan Kelompok**, menunjukkan, 0,0% tidak pernah hadir, 2,02% kadang-kadang hadir, 15,15% sering dan 82,83% menyatakan selalu hadir.

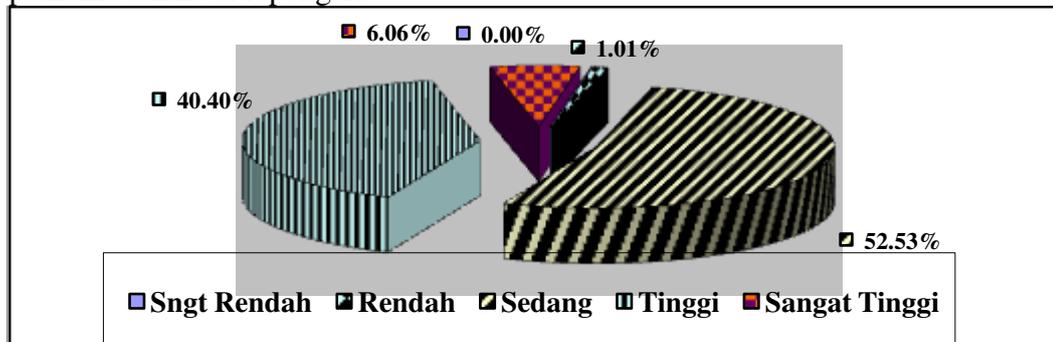
b. Tingkat Dukungan Masyarakat terhadap Pelaksanaan PNPM-MKP.

1) Aspek Perencanaan Program, menunjukkan bahwa 12,12 % dukungannya rendah, 67,68% dukungannya sedang, 16,16% dukungannya tinggi dan 4,04% dukungannya sangat tinggi. Tingkat dukungan masyarakat terhadap aspek perencanaan dalam kategori sedang, disebabkan karena masyarakat di dalam merencanakan suatu program masih perlu dituntun oleh pembina (pengelola program) atau program bersifat luncuran dari pemerintah (top-bottom), sehingga peranan masyarakat di dalam merencanakan kegiatan PNPM-MKP perlu ditingkatkan.



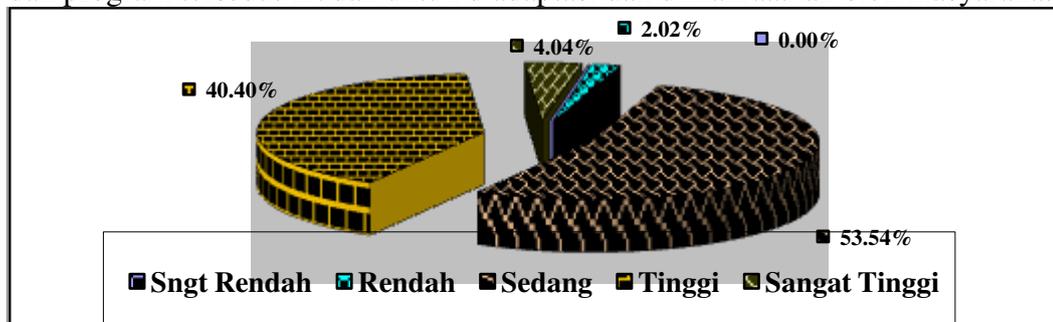
Gambar 4. Grafik Distribusi Responden Menurut Dukungannya Terhadap PNPM-MKP pada Aspek Perencanaan Program

2) Aspek Pelaksanaan Program, menunjukkan bahwa 1,01 % dukungannya rendah, 52,53% dukungannya sedang, 40,40% dukungannya tinggi dan 6,06% dukungannya sangat tinggi. Tingginya dukungan masyarakat pada aspek pelaksanaan program disebabkan karena masyarakat penerima PNPM-MKP) benar-benar dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik juga disebabkan karena responden mengikuti arahan dari pembina teknis di lapangan.



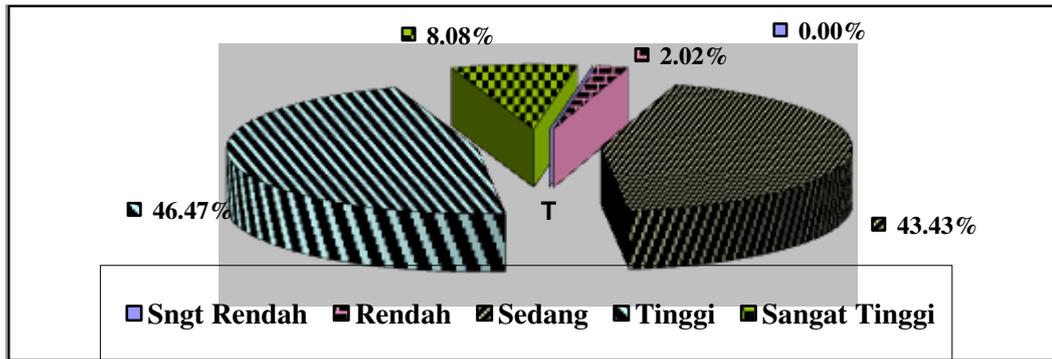
Gambar 5. Grafik Distribusi Responden Menurut Dukungannya Terhadap PNPM-MKP pada Aspek Pelaksanaan Program

3) Aspek Pemanfaatan Program, menunjukkan bahwa 2,02 % dukungannya rendah, 53,54% dukungannya sedang, 40,40% dukungannya tinggi dan 4,04% dukungannya sangat tinggi. Sumbangan pemikiran dan tenaga pada aspek ini sudah lumayan tinggi, tetapi dukungan berupa sumbangan materi terhadap pelaksanaan program masih sedang. Tingginya dukungan pada aspek pemanfaatan program menunjukkan bahwa ada kecenderungan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok, dan program tersebut mudah untuk diadaptasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



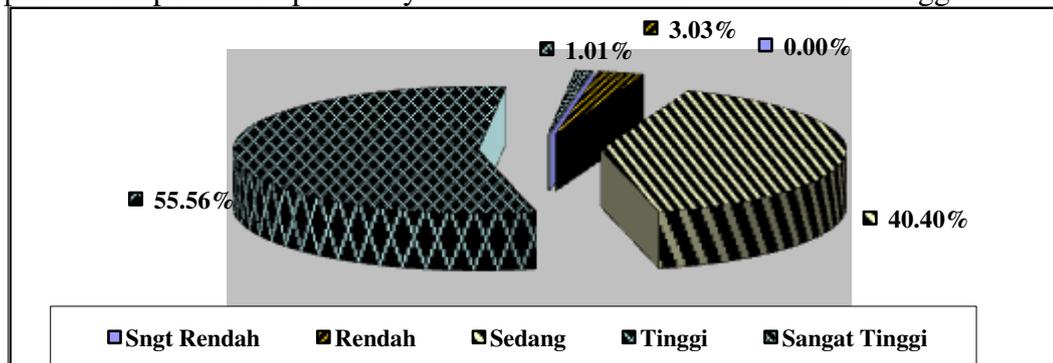
Gambar 6. Grafik Distribusi Responden Menurut Dukungannya Terhadap PNPM-MKP pada Apek Pemanfaatan Program

4) Aspek Monitoring dan Evaluasi Program, menunjukkan bahwa 2,02 % dukungannya rendah, 43,43% dukungannya sedang, 46,47% dukungannya tinggi dan 8,08% dukungannya sangat tinggi. Tingginya dukungan masyarakat pada aspek monev program disebabkan karena masyarakat penerima PNPM-MKP melakukan pengawasan secara ketat, dengan aturan dalam awig-awig kelompok (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga). Pengawasan secara internal kelompok dan pihak antar kelompok dalam wadah Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Bayu Segara yang ada di Kecamatan Kubu.



Gambar 7. Grafik Distribusi Responden Menurut Dukungannya Terhadap PNPM-MKP pada Aspek Monev Program

5). Aspek Dukungan Masyarakat Secara Kumulatif, menunjukkan bahwa 3,03 % dukungannya rendah, 40,40% dukungannya sedang, 55,56% dukungannya tinggi, dan 1,01% dukungannya sangat tinggi. Tingginya dukungan masyarakat secara kumulatif menunjukkan bahwa PNPM-MKP di Kabupaten Karangasem Tahun 2009 mendapat respon dan dukungan yang tinggi oleh kelompok masyarakat. Masyarakat penerima program sudah mampu untuk melakukan perencanaan, melaksanakan, memanfaatkan, dan melakukan monitoring dan evaluasi program secara baik. Tingginya dukungan secara kumulatif ini juga disebabkan karena modal sosial (terutama tingkat kepercayaan dan partisipasi) pada kelompok-kelompok nelayan di kecamatan Kubu relatif masih tinggi.

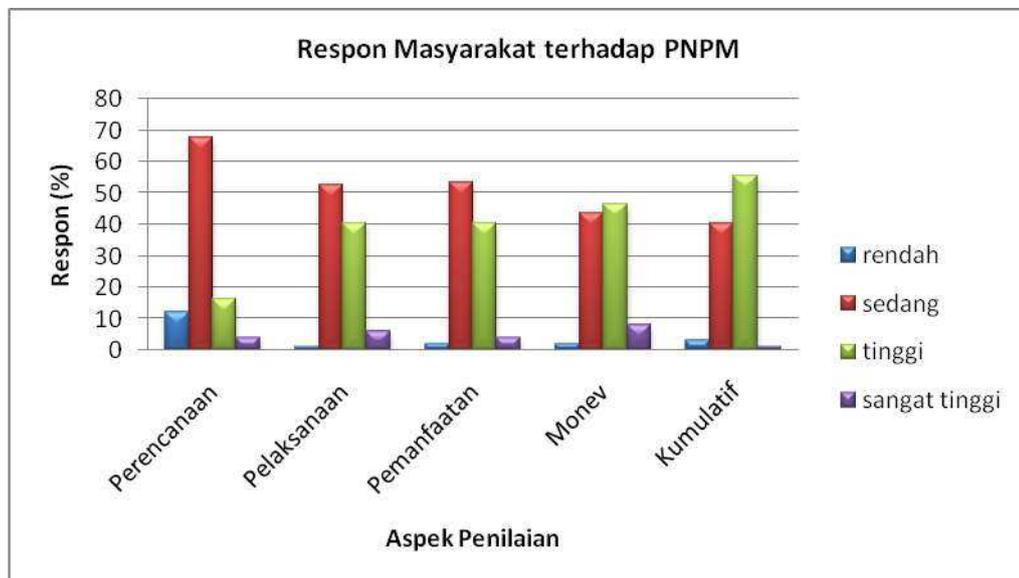


Gambar 8. Grafik Distribusi Responden Menurut Dukungannya Terhadap PNPM-MKP pada Aspek Secara Kumulatif

Secara keseluruhan respon masyarakat terhadap beberapa aspek di atas dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 9 berikut ini.

Tabel 2. Respon masyarakat terhadap aspek penilaian.

Aspek	Respon (%)			
	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi
Perencanaan	12,12	67,68	16,16	4,04
Pelaksanaan	1,01	52,53	40,4	6,06
Pemanfaatan	2,02	53,54	40,4	4,04
Monev	2,02	43,43	46,47	8,08
Kumulatif	3,03	40,4	55,56	1,01



Gambar 9. Respon Masyarakat terhadap PNPM

4.3. Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Dukungan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PNPM - MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

Faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan dengan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-MKP yaitu kelompok umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan dari pekerjaan utama dan jumlah kepemilikan alat tangkap.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Khi Kuadrat Terhadap Faktor-Faktor yang Ada Hubungan dengan Dukungan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PNPM-MKP di Kec. Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun 2009

No	Jenis Faktor	X ² -hitung	X ² -tabel ($\alpha=5\%$)
1.	Kelompok Umur	60,48*	9,49
2.	Tingkat Pendidikan	42,46*	9,49
3.	Jumlah Tanggungan Keluarga	33,88*	9,49
4.	Pendapatan dari Pekerjaan Utama	40,53*	9,49
5.	Jumlah Kepemilikan Alat Tangkap	23,86*	9,49

Keterangan : ns) = non signifikan, *) = signifikan

Sumber : Data Primer (diolah).

4.3.1 Kelompok umur

Kelompok umur dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelompok umur 21-37 tahun, 38-54 tahun, dan 55-70 tahun. Kelompok umur mempunyai hubungan yang signifikan dengan dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kecenderungan responden pada kelompok umur yang lebih muda memiliki dukungan yang lebih tinggi atau responden yang ada pada kelompok umur yang lebih tua memiliki kecenderungan dukungan yang lebih rendah terhadap pelaksanaan PNPM-MKP. Kenyataan ini memberi makna bahwa ada kecenderungan semakin muda responden semakin tinggi dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP, hal ini terjadi karena faktor umur mempengaruhi kemampuan seseorang untuk beraktivitas dan berproduktivitas.

4.3.2 Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pendidikan tinggi, pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang signifikan dengan dukungan responden terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kecenderungan responden pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki dukungan yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan PNPM-MKP atau responden yang ada pada tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki kecenderungan dukungan yang lebih rendah terhadap pelaksanaan PNPM-MKP. Kenyataan ini memberi makna bahwa ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan responden semakin tinggi dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP, hal ini terjadi karena faktor pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan logika dan bertindak lebih rasional;

4.3.3 Jumlah tanggungan keluarga

Jumlah tanggungan keluarga dibagi menjadi tiga kategori yaitu 5-6 anggota keluarga, 3-4 anggota keluarga, dan 0-2 anggota keluarga. Jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kecenderungan responden yang memiliki tanggungan keluarga yang lebih banyak memiliki dukungan yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan PNPM-MKP atau responden yang memiliki jumlah

tanggung keluarga lebih sedikit memiliki kecenderungan dukungan yang lebih rendah terhadap pelaksanaan PNPM-MKP, hal ini terjadi karena anggota keluarga dikerahkan secara optimal untuk mendukung dan melaksanakan PNPM-MKP.

4.3.4. Pendapatan dari pekerjaan utama

Pendapatan dari pekerjaan utama dibagi menjadi tiga kategori yaitu Rp. 2.300.000-3.000.000 per bulan, Rp. 1.600.000-<2.300.000 per bulan dan Rp. <1.600.000 per bulan. Pendapatan dari pekerjaan utama mempunyai hubungan yang signifikan dengan dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan dukungan yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan PNPM-MKP atau responden yang memiliki pendapatan yang lebih rendah memiliki kecenderungan dukungan yang lebih rendah terhadap pelaksanaan PNPM-MKP. Kenyataan ini memberi makna bahwa ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendapatan responden semakin tinggi dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP, hal ini terjadi karena tingkat pendapatan akan mempengaruhi jumlah pengeluaran yang dapat dibiayai di dalam meningkatkan taraf hidupnya nelayan. Pendapatan juga akan berpengaruh terhadap kemampuan nelayan untuk lebih berpartisipasi di dalam memberikan sumbangan dalam bentuk material (dana) terhadap suatu program; dan

4.3.5. Kepemilikan alat tangkap

Kepemilikan alat tangkap dibagi menjadi tiga kategori yaitu kepemilikan alat tangkap 5-6 set, 3-4 set, dan 0-2 set. Kepemilikan alat tangkap mempunyai hubungan yang signifikan dengan dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kecenderungan responden yang memiliki alat tangkap yang lebih banyak memiliki dukungan yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan PNPM-MKP atau responden yang memiliki alat tangkap yang lebih sedikit memiliki kecenderungan dukungan yang lebih rendah terhadap pelaksanaan PNPM-MKP. Jadi ada kecenderungan bahwa semakin banyak kepemilikan alat tangkap semakin tinggi dukungannya terhadap pelaksanaan PNPM-MKP. Hal ini terjadi karena kepemilikan alat tangkap akan berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan nelayan yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkat pendapatan nelayan yang merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

5. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pola PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Tahun 2009 sudah berjalan sesuai dengan pedoman teknis dan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat (*bottom up*); 2) Tingkat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-MKP pada aspek perencanaan program masuk kategori sedang, pada aspek pelaksanaan program masuk kategori sedang,

pada aspek pemanfaatan program masuk dalam kategori sedang, pada aspek monitoring dan evaluasi program masuk kategori tinggi, dan dukungan secara kumulatif masuk dalam kategori tinggi; dan 3) Faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM-MKP di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem adalah kelompok umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah kepemilikan alat tangkap, dan tingkat pendapatan dari pekerjaan utama.

5.2. Saran

Dari hasil dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut : 1) program PNPM-MKP tetap dapat dilanjutkan oleh pemerintah; 2) Pemerintah hendaknya lebih melibatkan masyarakat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan monitoring program sehingga program tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat (*bottom up*). Dalam pedoman teknis PNPM-MKP semestinya tidak ada pembatasan desa/kecamatan calon penerima dan pembatasan menu dari barang-barang yang boleh dibiayai dari program tersebut; dan 3) Untuk meningkatkan tingkat dukungan masyarakat dari kategori sedang ke kategori yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan PNPM-MKP baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan monitoring dan evaluasi program, hendaknya memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan dukungan masyarakat seperti kelompok umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah kepemilikan alat tangkap dan jumlah pendapatan dari pekerjaan utama dari calon penerima program.

5.3. Implikasi

Peningkatan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pola PNPM-MKP dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat pada kelompok umur muda (usia produktif), meningkatkan pendidikan peserta, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengupayakan peningkatan kepemilikan alat tangkap nelayan.

Oleh karena program PNPM-MKP benar-benar dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat, maka pemerintah maupun *stake holder* terkait dapat menggunakan program tersebut untuk dipakai sebagai salah satu model program pemberdayaan masyarakat pesisir di dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, dan Cipi Safrudin Abdul Jabar. 2007. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Alistair, Cockburn. 2000. *OO Analysis Model (Online)*.(<http://training.fws.gov/deo/pdfs/The%20Interpretive%20Development%20Model.pdf>). Diakses 28 Maret 2010.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Proses Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Tim Design.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem. 2008. *Karangasem Dalam Angka*. Amlapura: BPS
- Candiasa. 2004. *Statistik Multivariat*, Singaraja : Unit Penerbitan IKIP Negeri Singaraja.
- Dahuri R. J. Rais , S.P. Ginting, dan M.J Sitepu. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009. *Petunjuk Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2009*. Jakarta :Dirjen KP3K
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2009. *Pedoman Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2009*. Jakarta : Dirjen KP3K
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2008. *Potensi Pesisir Kabupaten Karangasem Tahun 2008* : Karangasem.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2007. *Statistik Perikanan Kabupaten Karangasem* . Amlapura : DPKP.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2009. *Statistik Perikanan Kabupaten Karangasem* . Amlapura : DPKP.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2009. *Laporan Akhir PNPM-MKP Tahun 2009* . Amlapura : DPKP.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2009. *Laporan Tim Pendamping PNPM-MKP Tahun 2009* . Amlapura : DPKP.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2009. *Laporan Akhir RTRW Pesisir Kabupaten Karangasem*. Amlapura : DPKP.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2009. *Laporan Akhir Konsultan Perencanaan Wilayah PNPM-MKP Kabupaten Karangasem*. Amlapura : DPKP.
- Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. 2009. *Laporan Tahunan Sistem Akuntansi Instansi (SAK-SIMAK BMN) Tugas Pembantuan Lingkup KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2009*. Amlapura : DPKP.
- Dinas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karangasem. 2007. *Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Rumah Tangga Miskin Kabupaten Karangasem*. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
- Fernandes. 1984. *Evaluation of Education Programs*. Jakarta: Educational and Curriculum Development.
- Gregory, Robert J. 2000. *Psychological Testing History, Principles, and Applications*. Boston : Allyn and Bacon.
- Kay R and Alder J. 1999. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN Spon an imprint of Roulledge.
- Kurniawan, A. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Peranserta Lembaga Keagamaan/Adat oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Dirjen KP3K DKP di Cipayung-Bogor: 22-25 Agustus.
- Lestari P. 2009. *Sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Mandiri Kelautan dan Perikanan*, Makalah disampaikan dalam Sosialisasi Program PNPM-MKP di Yogyakarta, 17 Maret

- Martasuganda, S., R. Drajat., Nelwan D., Christianto D.S., Daulay, HG., Nugroho, A.S., Setyaningsih, N., 2006. *Teknologi Untuk Masyarakat Pesisir Seri Alat Tangkap*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Meriam-Webster. 2010. *Meriam Webster Dictionary (Online)*. (<http://www.merim-webster.com/ictionary/analysis>). Diakses 30 Maret 2010
- Moleong J, Lexi. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nien-Lien Hsueh. 2002. *Analysis Model. (Online)*. (http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rsmhelp/v7r0m0/topic/analysis_model.html). Diakses 30 Maret 2010.
- Pratikto, W.A. 2006 *Arah dan Kebijakan Pembangunan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Peran Serta Lembaga Keagamaan/Adat oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Dirjen KP3K DKP di Cipayung-Bogor 22-25 Agustus.
- Royat. S. 2009. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)*. Makalah yang disampaikan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan/Ketua Tim Pelaksana Pengendali PNPM Mandiri pada Launching Program PNPM-MKP di Yogyakarta, 17 Maret
- Saad, S. 2006. *Peran Lembaga Keagamaan/Adat dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Makalah yang disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Peranserta Lembaga Keagamaan/Adat oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Dirjen KP3K DKP di Cipayung-Bogor 22-25 Agustus.
- Soetrisno R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Philosophy Press.
- Sudrajat Sutawijaya. 1999. *Statistik Non Parametrik*. Bandung: Program Pasca Sarjana Unpad.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Suharsimi, Arikunto dan Cepri Safrudin Abdul Jalal. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunartiningsih, A. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta : Aditya Media.
- Tasrif, Muhammad. 2005. *Analisis Kebijakan Menggunakan Model System Dynamic*. Bandung : Program Magister Studi Pembangunan. Institut Teknologi Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
- Usman, S. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Pustaka Pelajar.